

STRATEGI DUKCAPIL DALAM IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN MEDAN BARU

Oleh:

Roy Deven Laia ¹⁾

Prietsaweny RT Simamora ²⁾

Matius Bangun ³⁾

Sokhiwanofu Halawa ⁴⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3,4)}

E-mail:

roydevenlaia@gmail.com ¹⁾

wennyprietdebatara@gmail.com ²⁾

udastudi28@gmail.com ³⁾

sokhiwanofuhalawa@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how and what the Dukcapil Agency's strategy is in the implementation of good governance in the Medan Baru sub-district. Good governance implementers and inhibiting factors in the implementation of good governance for public services in Dukcapil Medan Baru District. This research was conducted in Medan Baru District with qualitative research methods. The research was conducted by collecting data using observation, documentation and interview techniques. Data collected from various sources and techniques for determining informants were carried out by selecting informants. The data used was then analyzed qualitatively. Based on the analysis of the data, it shows that the strategy for the intended object in implementing good governance in Medan Baru District, the implementation factors or obstacles to the strategy for this object are that there are still residents who have not been recorded in managing KTPs, unprepared resources, and a lack of adequate facilities. resulting in less effective or efficient services.

Keywords: Strategy, DISDUKCAPIL, Implementation, Good Governance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa strategi Dinas Dukcapil Dalam Implementasi *Good Governance* di kecamatan Medan Baru. Pelaksana *good governance* serta faktor-faktor Penghambat dalam pelaksanaan *good governance* terhadap pelayanan publik di Dukcapil Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Baru dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan. Data yang digunakan dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan analisis data menunjukkan Strategi di objek yang dituju dalam pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Medan Baru, faktor-faktor pelaksanaan atau penghambat strategi diobjek tersebut adalah masih terdapat warga yang belum terdata dalam pengurusan KTP, Sumber daya yang kurang siap, serta kurang nya fasilitas yang memadai sehingga mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif atau efisiensi.

Kata Kunci: Strategi, DISDUKCAPIL, Implementasi, Good Governance.

1. PENDAHULUAN

Pada pembukaan UU tahun 1945, didirikan NKRI bertujuan untuk menunjukkan kesejahteraan secara umum dan mencerdaskan anak bangsa. hal tersebut dapat diartikan sebagai negara harus berkewajiban dalam memenuhi setiap kebutuhan warga negaranya berdasarkan dari suatu sistem pemerintahan yang dapat mendukung untuk terciptanya berbagai penyelenggaraan pelayanan publik yang superior dalam rangka mewujudkan kebutuhan yang mendasar seperti hak sipil masing-masing warga negara terhadap produk publik dan jasa publik serta pelayanan administratif pemerintah yang mempunyai peranan yang relevan dalam menyediakan layanan terhadap publik yang superior bagi keseluruhan warganya yang sesuai pada amanat dalam UUD tersebut.

Berdasarkan tujuan negara, pembentukan suatu pemerintah di Indonesia dapat berpandangan untuk mencapai seluruh kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan penyelenggaraan kepentingan pada umumnya seperti pelayanan sosial/pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah harus mampu untuk memahami setiap tuntutan kepada masyarakat terkait pelayanan yang baik (*clean governance*). Saat ini penyelenggaraan dalam pelayanan publik harus dihadapkan pada kondisi yang tidak relevan dengan kebutuhan serta perubahan elemen kehidupan masyarakat, dan negara. Tuntutan masyarakat terhadap atas pelayanan publik tentunya lebih baik jika terlihat di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu pemerintah dalam tugasnya memenuhi setiap kebutuhan warga negara yang harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh elemen masyarakat. karena pada hal yang mendasar pemerintah dapat mewujudkan suatu fungsi pelayanan terhadap masyarakat (*publik service*),

dan pemerintah adalah pelayan bagi elemen masyarakat. Mereka tidaklah dilahirkan sebagai pejabat untuk melayani diri sendirinya, tetapi untuk melayani, mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani setiap warga mampu meningkatkan Administrasi suatu kependudukan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam setiap mewujudkan kelangsungan dalam melakukan pelayanan secara umum didalam organisasi yang diinginkan. Selanjutnya, untuk menaikan level sarana serta prasarana pelayanan terhadap bagi aparatur yang dimaksud adalah untuk menunjang setda dalam mendukung pelaksanaan setiap tugas atau fungsinya agar dapat berjalan secara semaksimal mungkin dan optimal (efektif dan efisien) dan dalam meningkatkan kemampuan dan integritas aparatur guna peningkatan kinerja dalam hal ini adalah dilaksanakan melalui pelatihan, dan meningkatkan kualitas dan kapasitas setiap perencanaan, maksudnya adalah supaya pelaksanaan setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara baik, teratur dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Good governance (pemerintah yang baik) merupakan upaya dalam suatu perwujudan dalam tata pengelolaan pemerintahan yang sangat amat baik, baik dari dalam segi pelayanan, dalam melakukan kepastian hukum, peraturan, kejelasan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Selain dari pada itu penyelenggaraan suatu pemerintahan yang sangat baik atau (*good governance*) juga suatu pemerintahan yang dapat berupaya untuk meminimalisir korupsi.

Berdasarkan pemerintah yang baik atau *good governance* dalam

pelayanan publik masyarakat masih ada mengeluhkan transparansi dalam pelayanan publik, yang seharusnya wajib diterapkan dalam pemberian pelayanan di Kantor Camat Medan Baru ini dapat pahami bahwa saat penulis melakukan suatu aktivitas dalam mengamati seperti halnya : biaya serta prosedur tidak pernah di umumkan secara terbuka, selain dari pada itu pegawai dalam setiap menyelesaikan surat-surat/dokumen yang telah dibuat membutuhkan waktu yang cukup lama, kurangnya/minimnya sarana serta prasarana yang ada, sehingga keberadaan petugasnya yang masih kurang rajin dan disiplin yaitu datang tidak tepat waktu (selalu terlambat) dan ada juga yang pulang pada saat berlangsungnya jam kerja, tidak profesional dalam memberikan setiap pelayanan, yang diberikan dalam hal ini adalah kerabat atau orang-orang yang dikenal. Dan masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mampu mengoperasikan komputer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Strategi dalam hal ini adalah salah satu upaya dan tindakan dalam melakukan adaptasi terhadap segala aspek dan lingkungannya, baik itu situasi tak terduga maupun yang terduga (Menurut stoner dkk dalam Tania 2018:) Mendefinisikan konsep strategi berdasar 2 persepektif yaitu konsep strategi yang dapat didefinisikan sebagai bentuk program dalam memastikan sesuatu dan dalam mencapai sasaran organisasi yang dituju serta implementasi misi-misinya. Berikutnya adalah, pandangan merupakan pola dalam menanggapi serta responsif setiap organisasi terhadap lingkungannya dari waktu ke waktu. Arti lain dari pada itu adalah suatu seni bagi setiap individual dan kelompok dalam satu pandangan. Kemampuan yang dimiliki adalah guna dalam mewujudkan sasaran lewat aturan yang diduga memiliki efisiensi

dan efektif, agar samapi pada sasaran yang ingin dicapai. umumnya bisa rumuskan sebagai salah satu upaya individual maupun setiap kelompok dalam setiap membuat pola tujuannya untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan.

1. Definisi Implementasi

Implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan dalam pelaksanaan terhadap apa yang disusun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan setelah setiap apa yang direncanakan di anggap berkualitas. (menurut Nurdin Usman 2022), implementasi adalah fokus pada aksi atau tindakan, aktivis mekanisme suatu sistem, implementasi tidak hanya sebatas aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan memiliki tujuan yang pasti yang akan ingin dicapai.

2. Jenis Jenis Implementasi

Implementasi menurut Doli Tua Mulia raja Panjaitan dkk merupakan kebijakan pengembangan karir ASN di Dinas BMBK Prov. Sumatera utara UPTJJ Kabanjahe. dan ada pun Menurut (Nugroho 2018) terdapat dua jenis penerapan (*implementation*) kebijakan, diantaranya implementasi secara langsung dan melalui perumusan kebijakan.

3. Model Implementasi

Menurut Agus Purwanto, Erwan.2022. implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan dalam memahami suatu implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan *top down* dan *botton up*. Ada suaatu hubungan yang dominan dari awal perkembangan studi implementasi suatu kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat hal-hal yang berbeda sehingga dapat pendekan pada *botton up*. Inti dari kedua hubungan ini adalah hal yang menjadi tolak ukur atau indikator tindakan para pelaksana (*administrator/birokrat*) sesuai dengan

langkah-langkah serta tujuan yang telah ditetapkan.

1. Definisi *Good Governance*

Good governance adalah serangkaian dalam manajemen suatu pembangunan yang bertanggungjawab dan solid sehingga memiliki arah yang sama terhadap prinsip demokratis dan tentunya pasti sudah efisien. Menghindari alokasi yang salah dan investasi yang salah, serta dapat memastikan bahwa tidak korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin dan menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha (Mardiasmo 2018:23).

2. Prinsip-Prinsip *Good governance*

Good governance Memiliki konsep yang telah terselenggarakan melengkapi beberapa prinsip tertentu. Dalam buku (kewarganegaraan dan masyarakat madani 2019) karya Heri Herdiawanto dkk, dijelaskan beberapa prinsip penyelenggaraan *good governance* yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat terhadap atas hak yang sama.
- b. Aturan hukum yang adil.
- c. Transparasi.
- d. Daya tanggap
- e. Berorientasi konsesus.
- f. Berkeadilan
- g. Efektivitas dan efisiensi.
- h. Akuntabilitas pemimpin
- i. Bervisi strategis.

3. Indikator *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2018:5) yaitu partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*). Berikut ini adalah penjelasan dari indikator diatas:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat harus memahami dan melibatkan diri dalam mengambil sebuah keputusan baik yang dilakukan secara langsung maupun yang tidak secara langsung, sehingga tidak timbulnya penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya.

2. Supremasi Hukum.

Dalam melakukan penempatan hukum wajib mempunyai peran yang sangat amat penting dalam menegakkan yang namanya keadilan, tujuannya adalah supaya hukumnya sama rata, netral dan tidak terjadi keberpihakan antara satu dengan yang lainnya.

3. Transparasi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran pemerintah terhadap rakyat pada umumnya, transparansi juga merupakan salah satu ciri-ciri pemerintahan yang baik (*good governance*), tanpa ada sifat yang transparan dari pemerintah maka yang terjadi adalah patologi birokrasi.

4. Berorientasi

Konsesus dan konflik sering terjadi pada politik demokrasi saat ini. Itulah tujuan mengapa diharuskan pemerintah harus berorientasi karena pada umumnya merekalah panutan dan cerminan anak bangsa dalam bernegara, apabila pemerintahannya tidak tentram tentuja warga dan masyarakatnya itu tidak tentram bahkan tidak sejahtera dan makmur.

5. Kesetaraan dan keadilan

Seluruh warga atau masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kedudukan yang sama dimata hukum.

6. Efektivitas Dan Efisiensi

Dalam menjalankan misi tugasnya diwajibkan memiliki sifat yang profesionalitas sehingga apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah hasilnya sangat memuaskan dan efektif.

7. Akuntabilitas

Seluruh keputusan pemerintah berdasarkan kebijakan wajib dapat dipahami oleh pemerintah itu sendiri baru di sampaikan kepada masyarakat kerana baik buruknya itu tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah

8. Visi Strategis

Visi strategis merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi negara.

4. Implementasi *Good Governance*

Implementasi *Good governance* diindonesia yang diusung nank dunia dan UNDP masih belum ada kesepakatan yang pasti.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini penelitian dekskriptif kualitatif.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat narasumber atau informan yang digunakan mendapatkan data atau informasi dalam penelitian, informan ini merupakan kunci dalam mendapatkan alat dan mengetahui jawaban dari apa yang di teliti

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Baru.pemilihan lokasi. Penelitian objek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa strategi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengurusan KTP di

Kecamatan Medan Baru,

Sumber Data

Sumber Data Primer dan sumber data skunder

Teknik Pengumpulan Data

Metode menurut (Sugiono, 2018;138-140) adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengandalkan hubungan secara lisan atau tanya jawab yang tidak beraturan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan data empris yang diperoleh adalah data kulitatif. Berupa kumpulan berwujud kata-kata bukan rangkaian angka bukan disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas DUKCAPIL Dalam Implementasi *Good Governnce* Di Kecamatan Medan Baru

pada hasil penelitian serta wawancara kepada pemerintah, baik kepada Dinas Dukcapil dan pemerintah Kecamatan Medan Baru serta kepada informan lainnya di kecamatan Medan Baru, saya menilai dengan menggunakan bentuk implementasi dari Edward III tentang keberhasilan dan kegagalan terhadap implementasi suatu kebijakan.

1. Terdapat warga yang belum terdata dalam pengurusan KTP

berdasarkan data dan keterangan dari informan masih ada masyarakat Medan Baru belum terdaftar di Dukcapil sebab sebab beberapa masyarakat tersebut berada di luar kota sehingga susah untuk dihubungi dan efeknya mereka tidak terdata dan sah jadi masyarakat kematan tersebut secara administratif.

2. Sumber daya

pemerintah pusat telah telah memberikan keputusan bahwa pegawai harus menangani seluruh pelayanan mengenai KTP oleh operator, operator merupakan orang yang bekerja dan siap membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan dalam kepengurusan KTP, dan wajib bekerja dengan sepenuh hati kepada masyarakat, operator juga harus menerapkan syarat dan ketentuan yang menjadi tolak ukur dalam kepengurusan

3. Sosialisasi

informasi memiliki dua bentuk dalam implementasi kebijakan pertama berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

4. Kewenangan Pemerintahan

kewenangan adalah salah tidak lain dari tugas dan fungsinya suatu pemerintah. oleh karena itu pemetintah harus jujur dan adil tanpa menyeleweng atau menyalahgunakan kewenangan apalagi kalua mengabaikan suatu kewenangan tersebut.

5. Fasilitas

dalam hal ini fasilitas merupakan alat dan perlengkapan yang sangat

dibutuhkan oleh suatu organisasi, jika kurangnya fasilitas otomatis pelayanannya kurang memadai dan terjadi beberapa kendala yang dialami naik yang melakukan pelayanan maupun yang dilayani.

6. Disposisi

disposisi adalah dapat diartikan sebagai sikap pelayanan atau agen pelayanan dalam suatu organisasi, hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan staff atau pegawai karena mereka memiliki pengaruh terhadap suatu tugasnya.

Indikator good governace menurut Sedarmayanti (2018:5) terdiri dari:

1. Partisipasi Masyarakat

Ini bentuk dari keterlibatan masyarakat sebagaimana dalam melakukan pengambilan suatu keputusan, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakuakn oleh perwakilan organisasi/lembaga yang legal. Berdasarkan hal tersebut masyarakat memiliki partisipasi dalam mendukung keputusan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Penacatatan sipil khususnya dalam pelayanan publik yaitu pelayanan dalam hal seperti pelayanan dalam pengurusan dokumen.

2. Supremasi Hukum

Hukum dapat berperan penting dalam menegakan suatu keadilan, karena itu hukum yang telah disepakati harus adil, netral, dan juga fokus pada konsepnya. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh melakaukan tindakan semena-mena tetapi berdasarkan keputusan secara bersama-sama.

3. Transparasi

Transparansi dapat diartikan sebagai kemudahan dalam mengakses beberapa informasi tentang aktivitas dalam penyelenggaraan suatu pemerintah bagi masyarakat. Kemudahan akses dalam hal ini merupakan informasi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kenyataan dan yang sesuai dengan napa informasi yang benar.

4. Responsif

Menyiapkan berupa bentuk layanan kepada seluruh kelompok elemen-elemen kebijakan dalam memberikan tanggapan yang cepat. Pelayanan kepada setiap komunitas merupakan pelayanan yang secara bersama-sama memberikan insipirasi dalam mencapai kerja sama yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

5. Berorientasi Pada Konsesus

Konsesus adalah sebuah frasa yang dapat menghasilkan serta menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui dengan seksama antar kelompok dengan kelompok yang lainnya. setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif inteljen untuk mendapat konsesus pengambilan keputusan sedangkan konflik merupakan pertentangan anatar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

5. SIMPULAN

1. Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Implementasi *Good Governace* Kecamatan Medan Baru saat ini sudah cukup baik. Hal ini di karenakan adanya kerja sama antara Staf dan pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

2. Ada pun faktor-faktor penghambat Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Dalam Implementasi *Good Governance* diantaranya masih terdapat fasilitas yang kurang memadai dalam hal ini, dikarenakan kerja sama kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih kurang.

6. DAFTAR PUSTAKA

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan., Sitanggung E.T. B., dan Karo-Karo, R. (2023) *Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Di Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi Prov. Sumatera Utara UPTJ Kabanjahe Jurnal Governance Opinion* 8(1),29-34. Dkk, Stoner. (2018:8) *Konsp. Strategi Berdasarkan 2 perspektif.*

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (2021). Implementasi Program Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara). *GOVERNANCE*, 1(1).

Hendryadi., et, al (2019;2018). *Proses Penyelidikan Naturalistik.*

Herdiwanto Heri Dkk.,2019 *Prinsip Penyelenggaraan Good Governance S, Tomo.2019., Reformasi Birokrasi Good Governance.* Jakarta: Indocap.

Kotler (laksana, 2018:85): *Pengaruh kuliatas pelayanan terhadap kepuasan.*

Mardiasmo (2018: 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa *Good governance*

Nugroho, (2018) *Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Pencapaian Penerimaan Pajak pada*

Badan Pajak Retribusi Daerah Jakarta Pusat Tahun 2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 70-78.

Pitriani, Jumiarti., 2021. Strategi Peningkatan pelayanan dalam pengurusan KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung.

Sugiono., (2018:138-140). Cara Untuk Mengandalkan Hubungan Sexara Lisan.

Sutrisno Hadi (dalam Sugiono 2018;229). Metode Penelitian bisnis. (Rev.ed) Bandung; Alvabeta.

Sedarmayanti, (2018: 5). The Effect of The Leading Commitment, The Management Competency Goods and Use of Information Technology on Effectiveness of

Fixed Assets. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 21-31).

Priharto, S. (2020). Pengertian strategi Tujuan, Ciri Dan Fungsinya pada Bisnis. *Accurate Online*.

Usman, Nurdin. (2022). Konteks implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: Grasindo.